

## **NALAR PANCASILA DALAM KOMUNIKASI POLITIK**

Indra Jaya

Pelaksana Akademik Mata kuliah Umum (PAMU), Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No 9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
indrajayasaerun@gmail.com

### **Abstract**

*This paper discusses the philosophical-theoretical three significant issues related to the existence of political communicates, namely the nature of political communication, political communication principles, and reason Pancasila in political communication. Reason is Pancasila is the embodiment of the values of Pancasila as the foundation of ethics in political communication. So that political communication is no longer used only as a tool to achieve political purposes, but should be submissive to the interests and ideals of the nation and the country as stated in the Preamble to the Constitution of 1945. Reasoning first principle of Pancasila politics in the context of political communication is to provide a theological foundation that political communication that is built to be in harmony with the values of divinity. The second reason Pancasila in political communication, namely that political communication should be conducted in a fair and uphold the values kemanusiaan. The third reason Pancasila in political communication is political communication are built and made to be oriented in maintaining the unity and integrity. The fourth reason in political communication contains Pancasila philosophy that any differences in political communication is a natural thing, but it must be remembered that the distinction should be guided by wisdom (wisdom) within the scope of deliberations. Reason fifth of Pancasila in political communication implies that political communication is done must uphold the values of justice regardless of their origins.*

**Keywords:** *Pancasila values, political communication, the nature and principles of political communication.*

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas secara filosofis-teoretis tiga persoalan penting yang terkait dengan eksistensi komunikasi politik, yaitu hakikat komunikasi politik, prinsip-prinsip komunikasi politik, dan nalar Pancasila dalam komunikasi politik. Nalar Pancasila yang dimaksud adalah pengejawantahan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etik dalam melakukan komunikasi politik. Sehingga komunikasi politik tidak lagi dijadikan hanya sebagai alat untuk meraih kepentingan politik, tetapi harus berkhidmat kepada kepentingan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nalar politik sila pertama Pancasila dalam konteks komunikasi politik adalah memberikan landasan teologis bahwa komunikasi politik yang dibangun harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Nalar kedua Pancasila dalam komunikasi politik, yaitu bahwa komunikasi politik harus dilakukan secara adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nalar ketiga Pancasila dalam komunikasi politik adalah komunikasi politik yang dibangun dan dilakukan harus diorientasikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Nalar keempat Pancasila dalam komunikasi politik mengandung filosofi bahwa setiap perbedaan dalam komunikasi politik adalah hal yang wajar, namun harus diingat bahwa perbedaan itu harus dilandasi oleh kebijaksanaan (*wisdom*) dalam lingkup musyawarah. Nalar kelima dari Pancasila dalam komunikasi politik mengandung pengertian bahwa komunikasi politik yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tanpa membedakan asal-usul mereka.

**Kata kunci:** nalar Pancasila, komunikasi politik, hakikat dan prinsip-prinsip komunikasi politik.

### **Pendahuluan**

Bagi para politisi, komunikasi politik telah menjadi bagian penting dalam kiprahnya. Komunikasi politik tidak saja digunakan untuk menyampaikan pesan politik, tetapi dapat digunakan untuk menangkis serangan politik, mengaburkan realitas politik, mengalihkan dari satu isu ke isu yang lain, membangun pencitraan,

memasarkan ide-ide atau gagasan-gagasan politik, bahkan dijadikan sebagai alat untuk menghantam lawan politik atau sering disebut sebagai pembunuhan karakter (*character assassination*). Komunikasi dalam politik bagaikan “darah” yang membawa beragam pesan dari mulai yang sifatnya konstruktif hingga yang destruktif. Komunikasi politik atau komunikasi secara umum

ditempatkan sebagai instrumen, sebagai alat yang dapat digunakan sesuai dengan keinginan komunikatornya.

Secara teoretik, realitas politik merupakan realitas bentukan, realitas yang secara sadar dikonstruksi melalui komunikasi. Dalam kajian konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengonstruksi dunia sosialnya (Bungin, ed., 2006). Oleh karena itu, politisi adalah makhluk yang “merdeka” untuk membuat konstruksi mengenai realitas politik yang dianggap menguntungkan diri dan kelompoknya. Ketika politik diposisikan sebagai yang dikonstruksi, maka politisi akan mengonstruksi realitas politik sebagaimana kepentingannya melalui komunikasi yang dibangunnya.

Lanskap komunikasi politik Indonesia menemukan ruang kebebasannya pada saat runtuhnya rezim Orde Baru dan masuk Orde Reformasi. Komunikasi politik yang mulanya dibangun diatas kepalsuan (artifisial) dan basa-basi berubah seratus delapan puluh derajat menjadi komunikasi yang bebas, radikal, bahkan kerap kali dikatakan kebablasan. Kekuasaan eksekutif yang dulu tak tersentuh (*untouched*) mengalami degradasi dan kehilangan sakralitasnya, sehingga siapa pun dapat mempersoalkannya hingga pada penggunaan kalimat-kalimat yang sifatnya sarkasme. Pada ruang kebebasan komunikasi politik saat ini, seorang politisi dapat menjatuhkan politisi lain menggunakan *content* (isi) komunikasi politik “hitam”. Dari situ pula lahirlah istilah kampanye hitam (*black campaign*). Bahkan bukan sebatas itu, seorang politisi bisa jatuh harkat dan martabatnya dengan memuat masa lalu yang bersangkutan yang negatif melalui media massa dan sosial. Misalnya, kasus perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kasus-kasus lainnya.

Sejatinya, komunikasi (politik) harus diorientasikan untuk menciptakan harmoni, menciptakan kesetaraan (*equality*), saling tukar informasi, membangun kebersamaan, dan menciptakan realitas politik yang kondusif. Menurut Ardial (2009), komunikasi politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi,

pandangan, dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan. Melalui komunikasi politik yang “sehat” akan terbentuk kondisi yang stabil dan memungkinkan pemerintah dapat membangun guna mencapai kesejahteraan bersama. Namun saat ini, komunikasi politik kerap kali dijadikan “martil” untuk menekan, menghajar, menghancurkan, bahkan mematikan kelompok lain dengan menggunakan beragam konspirasi yang cenderung menghalalkan segala cara.

Dalam kajian filsafat ilmu, terutama yang dibangun oleh para filosof timur, ilmu haruslah berdimensi etik yang harus memanusiakan manusia dan bukan menghancurkannya. Gerakan sekularisasi yang mencoba memisahkan antara ilmu dan agama sebagai sumber nilai telah menjadikan sejarah dan peradaban manusia jatuh ke titik nadir. Ilmu yang dikembangkan termasuk kajian dan praktek komunikasi politik harus mendapat legitimasi moral sehingga eksistensinya bermanfaat bagi kehidupan manusia secara universal (Syarbaini, 2011). Di Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila sebagai segala dari segala sumber nilai tidak memberikan tempat kepada pemisahan ilmu dengan nilai Pancasila. Pada tataran ontologis, epitemologis, dan aksiologis, ilmu tidak bebas nilai, tetapi terkait dengan nilai, yakni nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila. Sindiran yang menampar wajah kaum ilmuwan sebagaimana dikatakan Edwar W. Said (dalam Syahputra, 2007), demikian:

....kaum cerdik pandai telah tertipu. Dikatakann ilmu-ilmu sekuler yang mengklaim *value free* ternyata penuh dengan kepentingan ekonomi (sejarah ekspansi negara-negara kuat era globalisasi), kepentingan militer/perang (seperti ilmu nuklir), dan dominasi kepentingan kebudayaan Barat (orientalisme).

Merujuk kepada penjelasan tersebut, komunikasi politik sejatinya tidak bisa melepaskan diri dari Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* (dasar filsafat) dimana ilmu, kajian, dan perspektif dikembangkan dan dipergunakan untuk kesejahteraan bersama. Bila saat ini ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya komunikasi politik hanya digunakan untuk kepentingan

pragmatis tanpa dilandasi oleh dasar etis Pancasila, maka Negara ini akan terus berada pada situasi yang gaduh. Kasus terbelahnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) adalah bukti sah bahwa para politisi menggunakan retorika, komunikasi politik dan kekuasaan hanya untuk kepentingan sesaat, dan pada saat yang sama rakyat dikorbankan.

Pada realitas seperti itu, setiap politisi (aktor komunikasi politik) harus memiliki nalar Pancasila, yaitu cara-cara berkomunikasi politik dan berpolitik itu sendiri yang didasarkan atas pemikiran, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila secara utuh. Anomali politik yang tengah terjadi saat ini sehingga menimbulkan kegaduhan yang luar biasa disebabkan oleh perilaku komunikasi politik yang lepas kontrol dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila lebih banyak menjadi mainan politisi yang diucapkan sebagai hiasan bibir (*lip service*) yang justru untuk memperdaya masyarakat. Pancasila lepas dari pemahaman yang kritis, tidak menjadi sumber inspirasi dan penghayatan, dan tercampakan dalam perbuatan.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa hakikat komunikasi politik ?
2. Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip komunikasi politik ?
3. Bagaimana kaitan antara komunikasi politik dengan nalar Pancasila ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin memberikan penjelasan secara filosofis-ilmiah tentang hakikat komunikasi politik, prinsip-prinsip komunikasi politik, serta keterkaitan antara nalar Pancasila dengan keilmuan-teoretik komunikasi politik.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dalam praktek komunikasi politik oleh berbagai kalangan, terutama oleh para komunikator politik. Sejauh ini kerap kali terdapat kesenjangan antara praktek ilmu dengan nilai-nilai, atau bahkan dengan filsafat negara. Melalui kajian yang sederhana ini, penulis ingin memberikan “setitik” kontribusi pada wilayah teoretik dan praksis komunikasi politik.

## Pembahasan

Pada negara demokrasi seperti Indonesia, komunikasi politik memegang peranan penting

sebagai jembatan (*bridge*) yang menghubungkan pemerintah rakyatnya. Namun seiring dengan terbukanya kebebasan sebagai konsekuensi dari reformasi, komunikasi politik yang dilakukan oleh para politisi (*aktor politik*) lepas dari Pancasila sebagai nilai sehingga menyebabkan kegaduhan politik dan berujung pada perpecahan. Media massa telah banyak mempertontonkan seorang politisi menghujat politisi lain, atau partai politik yang satu menghantam partai politik yang lain. Cara-cara “barbarian” dalam komunikasi politik tersebut membuka ruang perpecahan dan konflik yang tajam sehingga secara politik merugikan bangsa Indonesia. Karena tidak jarang, ketika elit berkonflik akan merugikan rakyat kecil yang sesungguhnya mereka tidak memahaminya. Rakyatlah yang menjadi korban.

Jika diamati, “kuda liar” komunikasi politik yang cenderung destruktif ini disebabkan oleh hilangnya dimensi nalar Pancasila dalam praktek komunikasi politik. Cara-cara politisi dalam berpolitik saat ini cenderung pragmatis yang lebih mementingkan diri dan kelompoknya, sehingga komunikasi yang terbangun memposisikan menang-kalah. Bahkan untuk meraih kemenangan seorang politisi melancarkan komunikasi politik yang meruntuhkan harkat, martabat dan harga diri politisi lain.

Filosofi komunikasi politik berangkat pada pemahaman yang meletakkan penggunaan seluruh sumber daya komunikasi untuk mencapai cita-cita bersama dalam lingkup bangsa dan negara. Oleh karena itu, komunikasi harus dilakukan secara jujur, arif, egaliter, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Politisi harus mampu beranjak untuk mejelma menjadi seorang negarawan yang memiliki komitmen menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

“*Back to nalar Pancasila*” merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Komunikasi politik didasari dan dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan sehingga komunikasi politik yang terbangun tidak melenceng dari nilai-nilai religiusitas yang bersifat universal. Komunikasi politik harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung persatuan, dilakukan secara arif dan bijaksana, hingga mampu menciptakan rasa keadilan.

Bangsa ini memerlukan kesadaran kolektif akan nalar Pancasila. Untuk menjadikan hal tersebut, maka Pancasila pertama kali harus dimengerti dan dipahami, dirasakan dan dihayati

melalui kejernihan batin sehingga menjadi sikap, dan tentu saja Pancasila itu harus mewujudkan dalam seluruh sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memicu dan memantik sehingga menjadi sadar akan Pancasila bukan persoalan mudah, tetapi harus tetap diikhtikarkan tanpa lelah. Pendidikan Pancasila dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus tetap dipacu melalui metode pembelajaran yang lebih variatif, contoh-contoh yang aktual dan gagasan-gagasan yang segar. Bila saat ini, dunia perguruan tinggi disibukan oleh kurikulum berbasis kompetensi, maka suatu saat mungkin digagas tentang kurikulum berbasis Pancasila, atau keduanya diintegrasikan secara harmonis.

### Kesimpulan

Secara sederhana, komunikasi politik dapat dipahami sebagai setiap bentuk penyampaian pesan, yang berdimensi politik dari suatu sumber (aktor politik) kepada sejumlah penerima pesan. Sedangkan hakikat komunikasi politik adalah pendayagunaan seluruh sumber daya politik untuk meraih cita-cita bersama yang dalam konteks Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat.

Secara filosofis, ilmu pengetahuan termasuk komunikasi politik harus mengabdikan terhadap kemanusiaan. Artinya, komunikasi politik tidak boleh digunakan untuk mendiskreditkan pihak lain (lawan politik), atau sengaja dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan pihak lain baik secara individu maupun kelompok (organisasi). Untuk menjaga “marwah” komunikasi politik sebagai alat untuk mencapai cita-cita bersama, maka perlu nalar Pancasila untuk membentenginya. Nalar Pancasila yang dimaksud adalah pengejawantahan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etik dalam melakukan komunikasi politik. Ke depan kiranya perlu digagas, bahwa pengembangan kurikulum bukan saja berbasis kompetensi, namun berbasis Pancasila.

### Daftar Pustaka

Adib, M. (2010). *Filsafat ilmu: Ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ardial. (2009). *Komunikasi politik*. Jakarta: Indeks.

Anugrah, D. (2013). *Politik pencitraan wakil rakyat (studi dramaturgis tentang komunikasi politik wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bandung Jawa Barat)*. Disertasi. Bandung: Unpad.

Badudu-Zain. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bungin, B. (2006). *Metode penelitian kualitatif: aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.

Cangara, H. (2009). *Komunikasi politik, konsep, teori, dan strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Nimmo, D. (1999). *Komunikasi politik, komunikator, pesan dan media*. (Tjun Surjaman, penerjemah). Bandung: Rosda.

Rahmat, J. (1996). *Islam aktual*. Bandung: Mizan

Sobur, A. (2003). *Psikologi umum*. Bandung: Pustaka Setia.

Subiakto, H & Rachmah, I. (2014). *Komunikasi politik, media, dan demokrasi*. Jakarta: Kencana.

Syahputra, I. (2007). *Komunikasi profetik, konsep dan pendekatan*. Bandung: Simbiosis.

Syarbaini, S. (2011). *Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

